

ABSTRAK

Devi Ambar Sari, 2021: *Analisis Framing terhadap Pemberitaan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas Agama pada Seragam Sekolah di Media Online Kompas.com dan Republika.com*, Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Dosen pembimbing Amalia Rosyadi Putri, S.Kom.I, M.Med.Kom.

Kata kunci: Analisis Framing, Berita SKB 3 Menteri, Kompas.com, Republika.com

Media online merupakan sebuah sarana bagi berbagai kategori untuk mengapresiasi sebuah peristiwa ataupun aspek apapun yang bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat. Seperti halnya, media online Kompas.com dan Republika.com yang menyalurkan beritanya secara online, sehingga para pembaca lebih mudah mencari informasi yang mereka inginkan.

Fokus penelitian ini adalah, (1) Bagaimanakah framing dalam pemberitaan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dari kedua media online Kompas.com dan Republika.com? (2) Bagaimana perbedaan pemberitaan media online Kompas.com dan Republika.com dalam topik kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ini?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui framing pemberitaan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di media online Kompas.com dan Republika.com. (2) Untuk mengetahui perbedaan pemberitaan dalam Kompas.com dan Republika.com dalam topik kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan data-data berupa dokumen, pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan, yaitu analisis framing (analisis teks media) model William A. Gamson. Teori yang dijadikan landasan adalah teori ekonomi politik media Vincent Mosco.

Hasil penelitian yaitu (1) Framing dari kedua media online Kompas.com dan Republika.com sama-sama memberikan berita yang akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi, dengan memberikan informasi dari berbagai pendapat, menjelaskan secara detail fungsi toleransi akibat munculnya SKB 3 Menteri, toleransi sangat dibutuhkan agar antar umat beragama tidak memahami agama secara simbolik saja, akan tetapi juga secara substantif. (2) Perbedaan kedua media online, Kompas.com menulis beritanya lebih menjelaskan isi dari SKB 3 Menteri ini dikeluarkan pemerintah untuk tidak memaksa maupun mewajibkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan memakai seragam dengan kekhususan agama mereka masing-masing. Sedangkan, Republika.com memberikan kesan mengkritisi tentang munculnya aturan SKB 3 Menteri ini. Karena, munculnya kebijakan SKB 3 Menteri untuk sekolah dasar dan menengah cukup diatur oleh pemerintah daerah bukan pemerintah pusat.